



RENJA PERUBAHAN 2020

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan gambaran arah dan tujuan dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Perangkat Daerah tahun 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Semoga segala daya dan upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridha Allah SWT.

Mamuju, 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Dr. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19651005 198812 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BABI : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	7
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BABIII : TUJUAN DAN SASARAN	21
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
III.3. Program dan Kegiatan	26
BABIV : PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pemikiran di atas maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2019 menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020. Renja PD merupakan dokumen Rencana Pembangunan PD jangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 yaitu :

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”.

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :

Sulawesi Barat Maju : Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan Provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

Sulawesi Barat Malaqbiq : Komitmen untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020.

Pada perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga yaitu mewabahnya COVID 19 di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam

Renja mengalami kendala dalam pelaksanaannya disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi tersebut. maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan untuk menyesuaikan dengan kendala tersebut.

I.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) BPSDM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan perubahan anggaran tahun 2020;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2020;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja Perubahan PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2020;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2020.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Renja PD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja PD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dan Tahun 2020 (Triwulan I) Provinsi Sulawesi Barat pada tabel II.1.

**Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Barat**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan	
																					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10		11				
20	15																					
20	15	01																				
20	01	01																				
20	01	02																				
20	01	05																				
20	01	06																				
20	01	09																				
20	01	10																				
20	01	11																				
20	01	13																				
20	01	14																				
20	01	15																				

				undangan								
20	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah ASN dan Non ASN	433.000.000	65.019.000	71.180.000	71.099.000	99,89	65.240.000	21.255.000	4,91
20	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	1.618.000.000	246.479.521	265.000.000	264.662.295	99,87	421.601.000	131.380.608	8,12
	01	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang diikuti	1.832.000.000	186.726.000	300.000.000	299.903.000	99,97	251.375.000	46.003.000	2,51
20	01	22	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta	200.000.000	200.000.000	0	-	#DIV/0!	119.787.900	-	-
2	01	50	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	43.000.000						2.564.000	5,96
20	15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	74.990.000.000	199.800.000	158.740.000	128.920.000	81,21	687.025.000	537.000.000,00	0,72
2	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang diadakan	250.000.000	-		-		687.025.000,00	537.000.000,00	214,80
20	02	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	900.000.000	0	158.740.000	128.920.000	81,21			-
20	02	07	Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Jumlah Bangunan yang di pelihara	300.000.000	199.800.000	0	-	#DIV/0!	-	-	-
20	15	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	642.000.000	103.500.000	99.390.000	98.550.000	99,15	160.025.000	-	-
20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	179.000.000	46.450.000	46.300.000	46.300.000	100,00	50.775.000,00	-	-
20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	95.000.000	57.050.000	53.090.000	52.250.000	98,42	74.725.000,00	-	-
2	03	09	Pengadaan Pakaian Adat/Kedaerahan	Jumlah Pasang Pakaian adat/kedaerahan	50.000.000	-	-	-	#DIV/0!	34.525.000,00	-	-
20	15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas	15.587.000.000	723.854.500	1.068.185.000	1.044.574.800	97,79	967.658.800	49.078.400	0,31
20	05	01	Diklat Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah ASN Peserta Diklat	462.000.000	0	220.140.000	218.430.000	99,22	-	-	-
20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	1.252.000.000	174.745.700	205.000.000	199.563.300	97,35	401.399.000,00	49.078.400,00	3,92
20	05	01	Diklat Bendahara Keuangan Daerah	Jumlah ASN Peserta Diklat	462.000.000	0	220.140.000	218.695.000	99,34	-	-	-

20	05	01	Diklat Dasar satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah ASN Peserta Diklat	886.000.000	0	422.905.000	407.886.500	96,45	-	-	-
20	05	01	Diklat Penyusunan Renja OPD	Jumlah ASN Peserta Diklat	1.485.000.000	274.554.400	0	-	#DIV/0!	-	-	-
20	05	01	Diklat Pengembangan Kapasitas Camat dan Lurah/Kepala Desa	Jumlah ASN Peserta Diklat	578.000.000	274.554.400	0	-	#DIV/0!	-	-	-
2	05	71	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	960.000.000					286.629.900,00	-	-
2	05	96	Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan	Jumlah ASN Peserta Diklat	1.462.000.000					279.629.900,00	-	-
20	15	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	345.000.000	28.270.000	32.950.000	32.942.000	99,98	-	-	-
20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	37.000.000	10.540.000	6.520.000	6.516.000	99,94	-	-	-
20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	2.340.000	5.020.000	5.016.000	99,92	-	-	-
20	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	2.340.000	5.020.000	5.020.000	100,00	-	-	-
20	06	06	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	4.350.000	5.350.000	5.350.000	100,00	-	-	-
20	06	16	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	4.350.000	6.020.000	6.020.000	100,00	-	-	-
20	06	26	Penyusunan Rentra/Renja/Lakip dan LPPD	Jumlah Dokumen Laporan	31.000.000	4.350.000	5.020.000	5.020.000	100,00	-	-	-
20	15	78	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Proporsi ASN yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan	17.972.000.000	747.154.387	3.012.184.700	2.810.331.564	93,30	1.170.963.200	-	-
20	78	66	Diklat Kepemimpinan (DIKLATPIM)	Jumlah Peserta	9.127.000.000	155.334.000	1.326.916.200	1.262.738.200	95,16	1.170.963.200,00	-	-
	78	81	Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural	Jumlah Peserta	740.000.000	99.395.008	139.980.000	137.286.000	98,08	-	-	-
20	78	66	Diklat Fungsional Pejabat Pengawas urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	Jumlah Peserta	1.173.000.000	0	291.574.500	274.420.003	94,12	-	-	-
20	78	84	Diklat Revolusi Mental bagi ASN	Jumlah Peserta Pelatihan	682.000.000	0	205.916.000	190.537.500	92,53	-	-	-
	78	81	Diklat Training Officer Course (TOC)	Jumlah Peserta Diklat	852.000.000	0	257.581.000	190.043.800	73,78	-	-	-
20	78	97	Kerjasama Lembaga Kependidikan Formal dan Kepamong Prajaan	Jumlah Dokumen	351.000.000	147.155.389	57.000.000	56.991.000	99,98	-	-	-
20	78	84	Diklat Pengembangan Widyaiswara	Jumlah Tenaga Widyaiswara yang mengikuti diklat	762.000.000	137.522.000	215.000.000	199.569.374	92,82	344.181.000,00	-	-
2	17	33	Diklat Dasar Bagi CPNS	Jumlah Peserta	998.000.000					1.392.765.900,00	-	-
2	17	43	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi ASN	Jumlah Peserta Pelatihan	370.000.000					260.939.900,00	-	-

2	17	65	Peningkatan Kapasitas LSP - PDN se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta Diklat	550.000.000					796.034.900,00	-	-
	78	81	Pembentukan Tim Asesor	Jumlah Peraturan Gubernur	391.000.000	77.841.990	185.748.000	172.230.200	92,72	-	-	-
20	78	97	Pembentukan LPS-Pemda	Jumlah Peraturan Gubernur	1.087.000.000	0	157.226.000	151.272.487	96,21	-	-	-
20	78	84	Pembuatan Perencanaan (Master Plan) BPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan	1.000.000.000	0	0	-	#DIV/0!	-	-	-
20	78	97	Study Banding/magang	Jumlah ASN yang mengikuti Magang	368.000.000	0	175.243.000	175.243.000	100,00	-	-	-
	78	81	Monev Pelaksanaan Kediklatan Kabupaten Se Sulawesi Barat	Jumlah Kabupaten	420.000.000	129.906.000	0	-	#DIV/0!	-	-	-
TOTAL						2.365.864.550	6.311.504.000	5.995.697.672	95,00	2.591.873.300	68.140.057,50	1,13

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79); dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, BPSDM Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2016, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis, rencana, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi ;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Provinsi Sulawesi Barat;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja di atas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang Pengembangan SDM dapat terwujud.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Belum tersedianya gedung Pusdiklat yang representatif;
2. Belum terakreditasi dan terstandarisasinya mekanisme / sistem pelaporan data dan informasi Kediklatan di Sulawesi Barat dan masih bersifat sektoral;
3. Belum maksimalnya jumlah tenaga Widyaiswara;
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN;
5. Belum tersedianya pedoman dan dokumen penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM yang memadai;
6. Belum maksimalnya kompetensi sumberdaya manusia bidang Penyelenggaraan Kediklatan di Provinsi Sulawesi Barat;

7. Belum maksimalnya sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;
8. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang lebih baik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen Pengembangan SDM adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya;

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Peningkatan Kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya;
2. Penigkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas kompetensi ASN untuk perwujudan Pemerintahan yang terpercaya;
2. Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui Diklat untuk perwujudan Pemerintahan yang terpercaya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL BELANJA LANGSUNG					4.065.144.744,00			44.506.075.000,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				4.065.144.744,00			44.506.075.000,00	
4.06-001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan PAUD/TK		16.00 Persen	1.610.556.444,00		0.00 Persen	2.932.000.000,00
4.06-001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Provinsi Sulawesi Barat	649.00 Lembar	396.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	590.00 Lembar	714.000.000,00
4.06-001.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening/Kwitansi	Provinsi Sulawesi Barat	5.00 Paket	143.072.400,00	Dana Alokasi Umum	-	5.00 Paket	294.000.000,00
4.06-001.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Provinsi Sulawesi Barat	31.00 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	-	7.00 Unit	33.000.000,00
4.06-001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/pemeliharaan	Provinsi Sulawesi Barat	31.00 Unit	139.530.000,00	Dana Alokasi Umum	-	48.00 Unit	260.000.000,00
4.06-001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	Provinsi Sulawesi Barat	30.00 Unit	31.330.000,00	Dana Alokasi Umum	-	28.00 Unit	40.000.000,00
4.06-001.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Provinsi Sulawesi Barat	40.00 Paket	50.137.800,00	Dana Alokasi Umum	-	15.00 Paket	91.000.000,00
4.06-001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan	Provinsi Sulawesi Barat	266.00 Bulan	23.590.000,00	Dana Alokasi Umum	-	242.00 Bulan	75.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06-001.0 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor	Provinsi Sulawesi Barat	240.00 Unit	130.991.244,00	Dana Alokasi Umum	-	8.00 Unit	264.000.000,00
4.06-001.0 014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	Provinsi Sulawesi Barat	18.00 Unit	2.895.000,00	Dana Alokasi Umum	-	17.00 Unit	5.000.000,00
4.06-001.0 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Provinsi Sulawesi Barat	44.00 Terbitan	60.080.000,00	Dana Alokasi Umum	-	40.00 Terbitan	49.000.000,00
4.06-001.0 017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang ASN / Non ASN	Provinsi Sulawesi Barat	719.00 Kotak	55.290.000,00	Dana Alokasi Umum	-	653.00 Kotak	95.000.000,00
4.06-001.0 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi di luar Daerah	Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat	52.00 Laporan	306.121.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	47.00 Laporan	353.000.000,00
4.06-001.0 020	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Provinsi Sulawesi Barat	92.00 Laporan	260.535.000,00	Dana Alokasi Umum	-	83.00 Laporan	399.000.000,00
4.06-001.0 035	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah ASN Peserta Rapat	Provinsi Sulawesi Barat	44.00 Laporan	5.630.000,00	Dana Alokasi Umum	-	40.00 Laporan	242.000.000,00
4.06-001.0 049	Penataan Arsip OPD	Jumlah Dokumen Arsip	Provinsi Sulawesi Barat	1.00 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum	-	1.00 Dokumen	12.000.000,00
4.06-001.0 050	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih	Provinsi Sulawesi Barat	40.00 Unit	4.654.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	36.00 Unit	6.000.000,00
4.06-002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan prasarana Aparatur		90.00 Prog/Keg	538.605.000,00			95.00 Prog/Keg	35.850.000.000,00
4.06-002.0 004	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	Provinsi Sulawesi Barat	1.00 Unit	538.605.000,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Unit	450.000.000,00
4.06-002.0 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Sulawesi Barat	10.00 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Unit	400.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06-002.0046	Pengadaan Gedung Pusat Pengembangan SDM	JUmlah Gedung	Provinsi Sulawesi Barat	1.00 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Unit	35.000.000.000,00
4.06-003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		1.00 Persen	83.405.000,00			1.00 Persen	166.000.000,00
4.06-003.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Sulawesi Barat	68.00 Pasang	50.775.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	0.00 Pasang	59.000.000,00
4.06-003.0005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi Sulawesi Barat	72.00 Stell	32.630.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	40.00 Stell	42.000.000,00
4.06-003.0009	Pengadaan Pakaian Adat/Kedaerahan	Jumlah Pasang pakiaanan Adat kedaerahan	Provinsi Sulawesi Barat	68.00 Pasang	0,00	Pendapatan Asli Daerah	-	0.00 Pasang	65.000.000,00
4.06-005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas		1809.00 Kegiatan	207.341.900,00			180.00 Kegiatan	1.160.000.000,00
4.06-005.0001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	24.00 Orang	56.226.000,00	Dana Alokasi Umum	-	22.00 Orang	250.000.000,00
4.06-005.0071	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Peserta Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	33.00 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum	-	30.00 Orang	240.000.000,00
4.06-005.0096	Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan	Jumlah ASN Peserta Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	30.00 Orang	151.115.900,00	Dana Alokasi Umum	-	30.00 Orang	370.000.000,00
4.06-006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laopran		1.00 Belum Ada di Referensi	36.900.000,00			1.00 Belum Ada di Referensi	51.000.000,00
4.06-017	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Kegiatan		120.00 Kegiatan	1.588.336.400,00			120.00 Kegiatan	4.347.075.000,00
4.06-017.0017	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	Provinsi Sulawesi Barat	55.00 Orang	1.064.856.200,00	Dana Alokasi Umum	-	50.00 Orang	1.809.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06-017.0 028	Pengembangan Widyaiswara	JUmlah Tenaga Widyaiswara yang mengikuti Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	6.00 Orang	150.924.000,00	Dana Alokasi Umum	-	6.00 Orang	400.000.000,00
4.06-017.0 033	Diklat Dasar bagi CPNS	Jumlah Peserta	Provinsi Sulawesi Barat	280.00 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum	-	280.00 Orang	1.030.000.000,00
4.06-017.0 043	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi ASN	Jumlah ASN Peserta Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	30.00 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Orang	400.000.000,00
4.06-017.0 065	Peningkatan Kapasitas LSP - PDN se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta	Provinsi Sulawesi Barat	240.00 Orang	372.556.200,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Orang	708.075.000,00

II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan (pokok –pokok pikiran) tetapi bukan kewenangan kami di BPSDM dan tidak ada di Renja, program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan direvisi menjadi Perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lainnya Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang telah direvisi menjadi Perubahan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 3 (tiga) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB Memiliki *visi “Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”* dan *misi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”*. Hal ini dicapaidengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;

- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***.

^{3.} Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi dan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi ***“Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan”*** yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 3 (tiga) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional

yang terkait dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- d. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- e. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah serta menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2020

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam Pengembangan SDM Aparatur dan Non Aparatur
2. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang lebih baik

Sasaran yang ingin dicapai BPSDM Provinsi Sulawesi Barat pada RENJA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup BPSDM
2. Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Barat
3. Meningkatnya Standar Kualitas Lembaga BPSDM Provinsi Sulawesi Barat

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				4.065.144.744,00				44.506.075.000,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				4.065.144.744,00				44.506.075.000,00	
4.06-001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan PAUD/TK		16.00 Persen	1.610.556.444,00			0.00 Persen	2.932.000.000,00
4.06-001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Provinsi Sulawesi Barat	649.00 Lembar	396.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	590.00 Lembar	714.000.000,00	
4.06-001.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening/Kwitansi	Provinsi Sulawesi Barat	5.00 Paket	143.072.400,00	Dana Alokasi Umum	-	5.00 Paket	294.000.000,00	
4.06-001.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	Provinsi Sulawesi Barat	31.00 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	-	7.00 Unit	33.000.000,00	
4.06-001.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/pemeliharaan	Provinsi Sulawesi Barat	31.00 Unit	139.530.000,00	Dana Alokasi Umum	-	48.00 Unit	260.000.000,00	
4.06-001.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	Provinsi Sulawesi Barat	30.00 Unit	31.330.000,00	Dana Alokasi Umum	-	28.00 Unit	40.000.000,00	
4.06-001.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Provinsi Sulawesi Barat	40.00 Paket	50.137.800,00	Dana Alokasi Umum	-	15.00 Paket	91.000.000,00	
4.06-001.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan	Provinsi Sulawesi Barat	266.00 Bulan	23.590.000,00	Dana Alokasi Umum	-	242.00 Bulan	75.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06-001.0 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor	Provinsi Sulawesi Barat	240.00 Unit	130.991.244,00	Dana Alokasi Umum	-	8.00 Unit	264.000.000,00
4.06-001.0 014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	Provinsi Sulawesi Barat	18.00 Unit	2.895.000,00	Dana Alokasi Umum	-	17.00 Unit	5.000.000,00
4.06-001.0 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Provinsi Sulawesi Barat	44.00 Terbitan	60.080.000,00	Dana Alokasi Umum	-	40.00 Terbitan	49.000.000,00
4.06-001.0 017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang ASN / Non ASN	Provinsi Sulawesi Barat	719.00 Kotak	55.290.000,00	Dana Alokasi Umum	-	653.00 Kotak	95.000.000,00
4.06-001.0 018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi di luar Daerah	Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat	52.00 Laporan	306.121.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	47.00 Laporan	353.000.000,00
4.06-001.0 020	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Provinsi Sulawesi Barat	92.00 Laporan	260.535.000,00	Dana Alokasi Umum	-	83.00 Laporan	399.000.000,00
4.06-001.0 035	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah ASN Peserta Rapat	Provinsi Sulawesi Barat	44.00 Laporan	5.630.000,00	Dana Alokasi Umum	-	40.00 Laporan	242.000.000,00
4.06-001.0 049	Penataan Arsip OPD	Jumlah Dokumen Arsip	Provinsi Sulawesi Barat	1.00 Dokumen	0,00	Dana Alokasi Umum	-	1.00 Dokumen	12.000.000,00
4.06-001.0 050	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih	Provinsi Sulawesi Barat	40.00 Unit	4.654.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	36.00 Unit	6.000.000,00
4.06-002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan prasarana Aparatur		90.00 Prog/Keg	538.605.000,00			95.00 Prog/Keg	35.850.000.000,00
4.06-002.0 004	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	Provinsi Sulawesi Barat	1.00 Unit	538.605.000,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Unit	450.000.000,00
4.06-002.0 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Sulawesi Barat	10.00 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Unit	400.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06-002.0046	Pengadaan Gedung Pusat Pengembangan SDM	JUmlah Gedung	Provinsi Sulawesi Barat	1.00 Unit	0,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Unit	35.000.000.000,00
4.06-003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		1.00 Persen	83.405.000,00			1.00 Persen	166.000.000,00
4.06-003.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Sulawesi Barat	68.00 Pasang	50.775.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	0.00 Pasang	59.000.000,00
4.06-003.0005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi Sulawesi Barat	72.00 Stell	32.630.000,00	Pendapatan Asli Daerah	-	40.00 Stell	42.000.000,00
4.06-003.0009	Pengadaan Pakaian Adat/Kedaerahan	Jumlah Pasang pakiaanan Adat kedaerahan	Provinsi Sulawesi Barat	68.00 Pasang	0,00	Pendapatan Asli Daerah	-	0.00 Pasang	65.000.000,00
4.06-005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas		1809.00 Kegiatan	207.341.900,00			180.00 Kegiatan	1.160.000.000,00
4.06-005.0001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	24.00 Orang	56.226.000,00	Dana Alokasi Umum	-	22.00 Orang	250.000.000,00
4.06-005.0071	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Peserta Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	33.00 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum	-	30.00 Orang	240.000.000,00
4.06-005.0096	Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan	Jumlah ASN Peserta Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	30.00 Orang	151.115.900,00	Dana Alokasi Umum	-	30.00 Orang	370.000.000,00
4.06-006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laopran		1.00 Belum Ada di Referensi	36.900.000,00			1.00 Belum Ada di Referensi	51.000.000,00
4.06-017	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Kegiatan		120.00 Kegiatan	1.588.336.400,00			120.00 Kegiatan	4.347.075.000,00
4.06-017.0017	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	Provinsi Sulawesi Barat	55.00 Orang	1.064.856.200,00	Dana Alokasi Umum	-	50.00 Orang	1.809.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.06-017.0 028	Pengembangan Widyaiswara	JUmlah Tenaga Widyaiswara yang mengikuti Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	6.00 Orang	150.924.000,00	Dana Alokasi Umum	-	6.00 Orang	400.000.000,00
4.06-017.0 033	Diklat Dasar bagi CPNS	Jumlah Peserta	Provinsi Sulawesi Barat	280.00 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum	-	280.00 Orang	1.030.000.000,00
4.06-017.0 043	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi ASN	Jumlah ASN Peserta Diklat	Provinsi Sulawesi Barat	30.00 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Orang	400.000.000,00
4.06-017.0 065	Peningkatan Kapasitas LSP - PDN se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta	Provinsi Sulawesi Barat	240.00 Orang	372.556.200,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00 Orang	708.075.000,00

Jumlah Belanja Langsung	:	4.042.144.744,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	:	4.859.642.078,00
Jumlah Pagu Belanja	:	8.901.786.822,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat,

Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19651005 198812 1 002